

**PENGENDALIAN ANGGARAN
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Damianus Rudiansyah¹, Titin Ruliana², Heriyanto³
Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Email : Damianusrudiansyah01@gmail.com

Keywords : *Pengendalian
Anggaran, Anggaran Sektor
Publik, Rasio Efisiensi*

ABSTRACT

Tujuan utama dalam pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran secara tersanding. Penyandingan antara Anggaran dengan Realisasi menunjukkan tingkat pencapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai peraturan perundang-undangan. Laporan realisasi anggaran terdiri atas beberapa elemen, yaitu: pendapatan, transfer, belanja, surplus atau deficit, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan netto, dan Sisa Lebih Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiPKA).

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada penelitian, maka kesimpulan hasil analisis dan pembahasan pada penelitian, Pengendalian Anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 sebagai berikut: Dilihat Rasio Pertumbuhan Belanja Efisiensi karena Realisasi Belanja mengalami peningkatan. Dilihat Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja Efisiensi karena Realisasi Belanja mengalami penurunan. Dilihat Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Efisiensi karena Realisasi Belanja Operasinya mengalami penurunan. Dilihat Rasio Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Tidak Efisiensi karena Realisasi Belanja Operasinya mengalami peningkatan. Dilihat Rasio Efisiensi Belanja Cukup Efisiensi karena Realisasi Belanja kurang dari Anggaran.

Berdasarkan kesimpulan di atas maka hipotesis yang dinyatakan bahwa Pengendalian Anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur ditinjau dari Rasio Pertumbuhan Belanja, Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja, Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja, Rasio Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, Rasio Efisiensi Belanja tahun 2015 efisien, Diterima



PENDAHULUAN

Kriteria yang penting untuk mengetahui kemampuan instansi dalam mengatur rumah tangga di instansi itu dapat dilihat dari posisi keuangannya. Posisi keuangan dapat dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang menentukan besarnya pengeluaran instansi untuk membiayai semua kegiatan dalam setiap tahun anggaran.

Dalam Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam suatu periode pelaporan. Tujuan utama dalam pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran secara tersanding. Penyandingan antara Anggaran dengan Realisasi menunjukkan tingkat pencapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai peraturan perundang-undangan. Laporan realisasi anggaran terdiri atas beberapa elemen, yaitu: pendapatan, transfer, belanja, surplus atau deficit, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan netto, dan Sisa Lebih Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiPKA).

Belanja dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan social, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak berduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Laporan realisasi anggaran merupakan jenis laporan keuangan daerah yang lebih dahulu dihasilkan sebelum kemudian diisyaratkan untuk membuat laporan neraca dan laporan arus kas. Anggaran dalam pemerintahan merupakan tulang punggung penyelenggaraan pemerintahan. Anggaran memiliki peran penting sebagai alat stabilisasi, distribusi, alokasi sumber daya public, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Oleh karena itu laporan realisasi anggaran menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan yang utama pada instansi.

Berdasarkan kondisi dan latar belakang masalah tersebut dimana kinerja aparat pemerintahan khususnya dinas kehutanan dalam upaya peningkatan kemampuan untuk mengantisipasi dan dinamika pembangunan daerah di bidang kehutanan.

Anggaran sektor publik menurut Mardiasmo (2006:62) "suatu rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam suatu moneter".

Anggaran sektor publik merupakan rincian seluruh aspek kegiatan yang akan dilaksanakan yang tersusun atas rencana pendapatan dan pengeluaran yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun. Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu pemerintah dalam tingkat

pertumbuhan masyarakat seperti: listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.

Laporan realisasi anggaran adalah menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan menyajikan laporan secara komperatif.

Menurut Fuad dkk (2000:100):

Pengendalian adalah aktivitas untuk menemukan, mengoreksi adanya penyimpangan-penyimpangan dari hasil yang telah dicapai dibandingkan dengan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD dengan menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah dalam satu periode pelaporan. LRA menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Pengendalian merupakan usaha sistematis perusahaan untuk mencapai tujuan dengan cara membandingkan prestasi kerja dengan rencana dan membuat tindakan yang tepat untuk mengoreksi perbedaan yang penting.

Manajer mencermati laporan akuntansi dan laporan lainnya, dan kemudian membandingkan dengan rencana yang sudah disusun sebelumnya. Laporan akuntansi dan laporan lainnya yang masuk ke manajemen disebut umpan balik

Menurut Simamora (2002:6):

Fungsi pengendalian (*controlling*) merupakan proses memastikan bahwa hasil sesuai dengan rencana semula. Dalam rangka menyelenggarakan fungsi pengendalian, manajer mengambil langkah penting dalam rangka memastikan bahwa setiap organisasi mengikuti rencana yang telah digariskan pada tahap perencanaan

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) mendefinisikan pendapatan sebagai semua pemerintah Rekening Kas Umum Negara / Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibiayai lagi oleh pemerintah. Secara umum pendapatan dapat dipahami sebagai hak pemerintah daerah yang menambah kekayaan bersih terjadi akibat transaksi masa lalu.

Menurut Mahmudi (2009:138), Pertumbuhan Pendapatan dapat dihitung dengan rumus berikut:

Belanja dilingkungan akuntansi komersial dapat didefinisikan sebagai arus keluar dari *assets* atau segala bentuk penggunaan *asset* yang terjadi selama periode tertentu yang berasal dari produksi barang, peneraan jasa, atau aktivitas lain yang terjadi dalam kegiatan operasional entitas. Menurut accounting principal board (APB), belanja didefinisikan sebagai jumlah, yang diukur dalam uang dari kas yang dikeluarkan atau *property* lain yang di transfer, modal saham yang dikeluarkan, jasa yang diberikan atau kewajiban yang terjadi dalam hubungannya dengan barang atau jasa yang telah atau akan diterima.

Menurut Mahmudi (2009:155):

Berdasarkan akuntansi pemerintahan, belanja daerah dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dibatasi hanya pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang beralamat di JL. Kusuma Bangsa. Penelitian ini difokuskan pada Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur periode 2014 dan 2015

Alat Analisis

Dalam melakukan penelitian ini maka penulis menggunakan rumusan masalah dalam buku Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Mahmudi:2009) sebagai berikut:

Rasio Pertumbuhan Belanja

Rumus yang digunakan sebagai berikut Mahmudi (2009:160):

$$\text{Pertumbuhan belanja thn } t = \frac{\text{Realisasi Belanja Thn } t - \text{Realisasi Belanja Thn } t-1}{\text{Realisasi Belanja Thn } t-1}$$

Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

Rasio belanja operasi terhadap total belanja dirumuskan sebagai berikut Mahmudi (2009:164):

$$\text{Rasio Belanja Operasi Thd Total Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}}$$

Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja

Rasio belanja modal terhadap total belanja dirumuskan sebagai berikut Mahmudi (2009:164):

$$\text{Rasio Belanja Modal Thd Total Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}}$$

Rasio Belanja Langsung dan Tidak Langsung

Rasio Belanja Langsung dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja}}$$

Sementara itu, Rasio Belanja Tidak Langsung dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Tidak Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Tdk Langsung}}{\text{Total Belanja}}$$

Rasio Efisiensi Belanja

Rasio ini menggunakan rumus Mahmudi (2009:166):

$$\text{Rasio efisiensi belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efisien terhadap Laporan Relasasi Anggaran dapat dilihat dari perhitungan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2015 sebagai berikut:

Rasio Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja dilakukan untuk mengetahui berapabesar pertumbuhan masing-masing belanja, pertumbuhan tersebut rasional dan dapat di pertanggungjawabkan. Realisasi Belanja T_{ht} merupakan jumlah total belanja pada tahun berjalan sedangkan Realisasi Belanja T_{ht-1} tahun sebelumnya.

Rumus yang digunakan sebagai berikut Mahmudi (2009:160):

Pertumbuhan belanja thn t =

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Thn}_t - \text{Realisasi Belanja Thn}_{t-1}}{\text{Realisasi Belanja Thn}_{t-1}}$$
$$= \frac{\text{Rp } 66.635.158.060,00 - \text{Rp } 64.920.308.178,00}{\text{Rp } 64.920.308.178,00} \times 100\%$$
$$= \text{Rp } 0,0264 \text{ atau } 2,64$$

Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

Rasio belanja operasi terhadap total belanja dirumuskan sebagai berikut Mahmudi (2009:164):

$$\text{Rasio Belanja Operasi Thd Total Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}}$$
$$= \frac{\text{Rp } 53.521.909.190,00}{\text{Rp } 66.635.158.060,00} \times 100\%$$

Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja

Rasio belanja modal terhadap total belanja dirumuskan sebagai berikut Mahmudi (2009:164):

$$\text{Rasio Belanja Modal Thd Total Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}}$$
$$= \frac{\text{Rp } 13.113.248.870,00}{\text{Rp } 66.635.158.060,00} \times 100\%$$
$$= 0.20 \text{ atau } 20\%$$

Rasio Belanja Langsung dan Tidak Langsung

Rasio Belanja Langsung dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja}}$$

$$= \frac{\text{Rp } 32.388.026.000.00}{\text{Rp } 85.642.185.000.00} \times 100\%$$

$$= 0.38 \text{ atau } 38\%$$

Sementara itu, Rasio Belanja Tidak Langsung dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Tidak Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Tdk Langsung}}{\text{Total Belanja}}$$

$$= \frac{\text{Rp } 53.254.159.000.00}{\text{Rp } 85.642.185.000.00} \times 100\%$$

$$= 0.62 \text{ atau } 62\%$$

Rasio Efisiensi Belanja

$$\text{Rasio efisiensi belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp } 66.635.158.060,00}{\text{Rp } 80.905.282.270,00} \times 100\%$$

$$= 82 \text{ atau } 82 \%$$

Tabel 7: Hasil Perhitungan Pada Anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur 2015

| No. | Uraian | 2015 | Kategori |
|-----|---|------------|---------------|
| 1 | Rasio Pertumbuhan Belanja | 2,64% | Efisien |
| 2 | Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja | 80% | Efisien |
| 3 | Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja | 20% | Efisien |
| 4 | Rasio Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung | 38% 62% | Tidak Efisien |
| 5 | Rasio Efisiensi Belanja | 82% | Cukup Efisien |

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan, maka pembahasan lebih lanjut akan dilakukan dengan menguraikan pemecahan dan penyelesaian permasalahan, yaitu sebagai berikut:

1. Rasio Pertumbuhan Belanja

Pengendalian Anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 ditinjau dari Rasio Pertumbuhan Belanja 2,64% sehingga dalam kategori Efisiensi karena Realisasi Belanja Tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar Rp 66.635.158.060.00

2. Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja Pengendalian Anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 ditinjau dari Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja 80% sehingga dalam kategori Tidak Efisien karena Realisasi Belanja Operasi Tahun 2015 mengalami penurunan sebesar Rp 53.521.909.190,00
3. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Pengendalian Anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 ditinjau dari Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja 20% sehingga dalam kategori Tidak Efisien karena Realisasi Belanja Modal Tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar Rp 13.113.248.870,00
4. Rasio Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Pengendalian Anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 ditinjau dari Rasio Belanja Langsung 38% dan Belanja Tidak Langsung 62% sehingga dalam kategori Cukup Efisien karena Total dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung mengalami peningkatan sebesar Rp 85.642.185.000,00
5. Rasio Efisiensi Belanja Pengendalian Anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 ditinjau dari Rasio Efisiensi Belanja 82% sehingga dalam kategori Cukup Efisien karena Realisasi Belanja Tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar Rp 66.635.158.060,00

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada penelitian, maka kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut:

1. Dilihat Rasio Pertumbuhan Belanja Pengendalian Anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Efisien karena Realisasi Belanja Tahun 2015 mengalami peningkatan.
2. Dilihat Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja Pengendalian Anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Efisien karena Realisasi Belanja Operasi Tahun 2015 mengalami penurunan.
3. Dilihat Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Pengendalian Anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Efisien karena Realisasi Belanja Operasi Tahun 2015 mengalami peningkatan.

4. Dilihat Rasio Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Pengendalian Anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Tidak Efisiensi karena Realisasi Belanja Operasi Tahun 2015 mengalami peningkatan.
5. Dilihat Rasio Efisiensi Belanja Pengendalian Anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Cukup Efisiensi karena Realisasi Belanja pada Tahun 2015 kurang dari Anggaran.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka hipotesis yang dinyatakan dari 5 kriteria tersebut hanya ada 3 kriteria yang efisien terhadap realisasi anggaran dengan demikian hipotesis diterima.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka saran yang dapat diajukan sehubungan dengan penelitian ini sebagai berikut:

Dalam penelitian ini penulis hanya melakukan analisis hanya pada priode 1 tahun disarankan penelitian selanjutnya untuk dapat menganalisis dengan waktu/priode lebih dari 1 tahun sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih lengkap dan signifikan terhadap perkembangan realisasi anggaran pemerintah pada efisiensi pengendalian anggaran.

REFERENCES

- Arif, Bahtiar, 2001, *Akuntansi Sektor Publik*, Erlangga, Jakarta
- Baridwan, Zaki dkk. 2004. "*Intermediate Accounting*", Edisi Kedelapan, Cetakan Kelima, BPFE Yogyakarta
- Bastian, Indra. 2007. "*Audit Sektor Publik*". Jakarta: Erlangga
- E. Keiso, Donald, 2003, *Intermediate Accounting*, Edisi Ketujuh, Binarupa Persada Jakarta.
- Fuad.M, 2001, *Anggaran Perusahaan: Suatu Pendekatan Praktis* Jakarta: Gramedia
- Halim, Abdul. 2008. "Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah". Jakarta: Salemba Emp
- Harahap, Sofyan Safri, 2007. *Teori Akuntansi*, Edisi Revisi, PT. Grafindo Persada, Jakarta
- Haryono, Jususp, 2005, *Dasar-Dasar Akuntansi*, Jilid 1, Edisi Keenam, YKPN, Yogyakarta